

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL**

Penulis memilih judul *“Peran Penting Indonesia Di Forum Regional ASEAN Plus One (Cina) Sebagai Bentuk Strategi Politik Luar Negeri R.I Dalam Mencapai Kepentingan Nasional”* dengan alasan :

Pertama : penulis tertarik dengan eksistensi kondisi politik luar negeri R.I. pada kawasan regional ASEAN dengan melihat wacana tata-hubungan internasional yang menuntut peranan aktif aktor negara dalam menyikapi setiap sendi hubungan kerjasama antar negara yang berujung pada pencapaian kepentingan nasional negara tersebut.

Kedua : penulis ingin mengetahui sejauh mana peran strategi politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan kerjasama pada forum regional ASEAN plus one (dengan Cina) dengan melihat peta kekuatan politik dunia dalam tata hubungan Timur-Barat umumnya dan Asia Timur Khususnya. Hal ini sesuai dengan latar belakang/*background* atau bidang studi yang ditekuni penulis yaitu : Ilmu Hubungan Internasional.

Ketiga : penulis telah melihat dan mengamati bahwa judul yang penulis ajukan belum pernah dibuat dan diajukan oleh penulis lain sebelumnya.

Dari pertimbangan ketiga unsur alasan tersebutlah penulis mengajukan

Dari pertimbangan tersebutlah penulis memilih dengan judul :

***“Peran Penting Indonesia Di Forum Regional ASEAN Plus One (Cina)  
Sebagai Bentuk Strategi Politik Luar Negeri R.I. Dalam Mencapai  
Kepentingan Nasional”***

**B. TUJUAN PENULISAN**

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam tentang Peran dan strategi Politik Luar Negeri R.I dalam mencapai kepentingan Nasional Indonesia dalam hubungan kerjasama regional ASEAN plus one (Cina), sehingga dapat memberikan gambaran obyektif dengan tujuan untuk memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang ada guna memperoleh jawaban dengan teori yang relevan terhadap permasalahan dan sekaligus membuktikan hipotesa yang disusun penulis dengan bukti data-data yang disusun secara sistematis .

Selain itu penulisan ini dimaksudkan sebagai manifestasi dari penerapan teori-teori yang pernah penulis peroleh selama di bangku kuliah. Dan terakhir tujuan yang paling hakiki dan tidak kalah pentingnya dari penulisan ini adalah untuk dijadikan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **C. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pada akhir abad ke-20 sekarang ini, Dunia masih terus mengalami perubahan-perubahan cepat dan mendasar di berbagai bidang yang pada gilirannya mengakibatkan berlanjutnya proses transformasi luas pada peta politik dan ekonomi global serta pada pola hubungan antar negara. Arus perubahan-perubahan tersebut sebenarnya telah mulai bergejolak sejak awal warsa 90-an. ketika periode tersebut berlangsung sendi-sendi tatanan hubungan dunia yang terbentuk sesuai dan sebagai warisan perang dunia ke-II mulai berguguran, disisi lain konstelasi global baru yang muncul masih belum mencapai titik kristalisasi nya yang mapan. Perkembangan tersebut terjadi dengan ditandai antara lain, runtuhnya tembok berlin, sirnanya sebuah kekuatan negara adidaya dengan tereleminasinya eksistensi Uni Republic Sovyet Sosialis (USSR) dari peta kekuatan politik dunia, serta terjadinya transformasi radikal dalam tata-hubungan Timur-Barat yang mengakibatkan berakhirnya Perang Dingin.

Usainya Perang Dingin berdampak positif pada hubungan internasional yang menimbulkan berbagai kesempatan dan peluang baru bagi negara-negara, akan tetapi perubahan-perubahan tersebut juga menjadi tantangan dan problema baru yang perlu disikapi dengan bijak oleh aktor Hubungan Internasional. Maka kini kita memasuki suatu era yang ditandai dengan hubungan saling ketergantungan "interdependensi" antar negara-bangsa yang semakin mendalam, saling keterkaitan antar-masalah yang semakin erat, serta proses globalisasi

dimobilisasi oleh kemajuan-kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dibidang komunikasi dan informasi. Implikasinya dunia terasa semakin menciut, batas-batas antar negara semakin kabur dan kaidah-kaidah seperti kedaulatan negara dan integritas teritorial semakin terkikis maknanya. Setiap bangsa, negara dan lembaga internasional tanpa terkecuali harus menyesuaikan diri pada konstelasi global yang telah berubah dan yang sedang terus berubah sedemikian drastisnya dan tak terelakkan, perubahan-perubahan tersebut memunculkan aneka ragam tantangan dan peluang baru bagi Indonesia di masa sekarang dan masa mendatang.

Munculnya fenomena hubungan ekonomi internasional pada era pasca Perang Dingin adalah sesuatu yang baru bagi pola kerjasama negara-negara<sup>1</sup> di pentas internasional. Akhir Perang Dingin telah membawa berbagai implikasi, tidak hanya di bidang politik dan militer namun juga ekonomi dunia. Terlibatnya aktor-aktor negara berkembang tidak hanya sebagai perluasan pasar tapi sekaligus juga menunjukkan adanya perubahan pola ekonomi dunia. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya kerjasama ekonomi negara-negara maju dengan negara-negara berkembang.

Dalam hubungan kerjasama ekonomi antar negara, seringkali perdagangan dianggap memiliki nilai rendah dari segi politik, seperti kedaulatan kepentingan nasional, kekuasaan dan angkatan bersenjata<sup>1</sup>. Akan tetapi dalam

---

<sup>1</sup> Richard Rosecrance, *Kebangkitan Negara Dagang : Perdagangan dan Penaklukan di Dunia*

sistem internasional yang mengakui pergeseran suatu sistem, muncul kecenderungan baru bahwa hubungan perdagangan sangat menentukan bahkan dapat mengubah sama sekali eksistensi antar negara.

Pada pertengahan tahun 1997 perekonomian kawasan Asia mulai tergoncang tepatnya pada bulan Juli 1997, bermula dari menurunnya nilai mata uang Thailand Bath terhadap mata uang Amerika yaitu Dollar, yang kemudian merambah ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Philipina, Korea Selatan, dan kondisi yang terparah dari krisis ini adalah Indonesia.

Bermula dari krisis di pasaran uang yang kemudian menjadi krisis ekonomi dan krisis sosial politik yang serius, serta mulai menyebar ke bidang-bidang lain. Krisis moneter ditandai dengan melemahnya nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing terutama Dollar Amerika Serikat, sementara krisis ekonomi ditandai dengan menurunnya produktifitas kinerja ekonomi.

Krisis ekonomi dan dampak psiko-sosial yang ditimbulkan menyadarkan bangsa Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan kegagalan ekonomi dengan mengkaji ulang kebijakan-kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam memberikan kontribusi terhadap percepatan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh. Pada sektor ekonomi ketergantungan industri nasional terhadap modal, bahan baku, suku cadang dan teknologi produksi dari luar memaksa kita untuk kembali pada peranan ekonomi berbasis sumber daya alam. Alam

Indonesia sendiri menyediakan keunggulan kompetitif yang memadai apabila sejumlah hambatan struktural pengelolaannya dapat tersolusikan dengan baik.

Untuk dapat menembus pasaran internasional strategi ekspor yang dilakukan adalah Politik Perdagangan Internasional, yaitu cara-cara, strategi apa yang akan dilakukan pemerintah untuk memasuki dan mengembangkan perdagangan internasionalnya.

Dalam ilmu hubungan internasional dijabarkan, pengetahuan tentang suatu wilayah baik secara regional maupun secara individu negara. Dengan demikian akan dapat diketahui politik luar negeri suatu negara pada umumnya dan politik perdagangan internasional pada khususnya. Dan dalam ilmu hubungan internasional terdapat pengetahuan tentang ide-ide politik yang dari pengetahuan itu kita dapat mengetahui ide politik suatu negara mitra usaha perdagangan negara kita. Dari pengetahuan ide politik umum ini kita akan dapat memahami tentang politik ekonomi suatu negara. Dengan demikian menyiapkan diri kita untuk berkomunikasi internasional dengan lebih baik. Dalam ilmu hubungan internasional kita dapat mengetahui perkembangan politik internasional yang juga berpengaruh terhadap perdagangan internasional dan perdagangan bilateral<sup>2</sup>.

Saat Cina memutuskan untuk bergabung dengan World Trade Organization (WTO) beberapa waktu lalu, dan Cina resmi menjadi anggota WTO, pada tanggal 17 September 2001 di Genewa. banyak pengamat merasa pesimistis akan kemampuan Cina. Maklum, Cina yang sebelumnya menutup diri

---

<sup>2</sup> <http://www.kemkominfo.go.id/press/2001/09/17/01091701.htm>

dari lalu lintas perdagangan dunia, dinilai tidak memiliki pengalaman yang cukup menghadapi perdagangan bebas. Apalagi Cina, di kala itu didominasi oleh kebijakan ekonomi sentralistik yang membendung arus masuk modal asing.

Tetapi kini, Cina telah menjadi pendatang baru yang cukup diperhitungkan di tengah arus lalu lintas perdagangan dunia. Di tahun 2004 ini, Indonesia telah menempatkan Cina sebagai mitra dagang terbesar setelah Jepang. Saat ini neraca perdagangan Indonesia-Cina ditandai mengalirnya barang-barang konsumsi dari Cina seperti peralatan elektronik, kendaraan bermotor, produk garmen dan mesin-mesin produksi. Cina juga merupakan negara asal impor non-migas terbesar bagi Indonesia setelah Jepang dengan nilai 205,3 juta dollar AS<sup>3</sup>. Pesatnya pertumbuhan ekonomi Cina, mendorong mereka melakukan ekspansi pasar besar-besaran. Ekspansi pasar, walaupun terkesan dilakukan dengan hati-hati, tetapi cukup meresahkan negara-negara tetangga, Jepang, Korea Selatan dan negara ASEAN, karena diikuti basis pertumbuhan ekonominya yang kuat. Cina telah tampil sebagai the new miracle of Asia sejajar dengan negara-negara the big economic of Asia seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong yang pernah disebut-sebut sebagai pusat keajaiban ekonomi Asia.

Dibandingkan dengan Jepang yang tengah menjalankan program zero growth, pertumbuhan ekonomi Cina saat ini mencapai 8%. Kesuksesan ini merupakan bagian dari strategi market economy yang menjadi orientasi Cina Pasca-Jiang Zemin. Reformasi Partai Komunis Cina (PKC) dalam Kongres

---

<sup>3</sup> <http://www.Kompas.com> edisi 3 Januari 2004.





ke pasar-pasar internasional. ASEAN dan Indonesia terutama merupakan negara-negara yang diprioritaskan Cina menjadi target utama barang-barang produksinya.

Catatan akhir tahun 2003 menunjukkan bahwa Cina telah menjadi negara pengekspor non-migas terbesar bagi Indonesia setelah Jepang. Nilai impor Indonesia dari Cina di bulan November 2003 mencapai 205,3 juta dollar AS, hanya sedikit di bawah Jepang dengan nilai 341,4 juta dolar AS dan melampaui AS yang hanya memperoleh 203,89 juta dolar AS. Dengan demikian, Cina telah menjadi mitra dagang kedua Indonesia setelah Jepang.<sup>4</sup>

Cina memiliki potensi di bidang ekonomi dan politik di Dunia internasional. Hal ini, telah disadari oleh para pemimpin Cina, mereka telah membuat rancangan aksi baik ekonomi maupun politik untuk meningkatkan peran Cina di mata negara-negara di dunia. Rancangan atau program ini, terus dilaksanakan dan diperbaiki oleh setiap pemimpin Cina secara berkesinambungan sesuai dengan sistem politik Cina yang berdasarkan atas satu partai yang berkuasa secara terus-menerus. Para pemimpin Cina tidak henti-hentinya mendorong rakyatnya untuk bekerja keras membangun negara demi tercapainya tujuan yang telah digariskan oleh para pemimpin terdahulu mereka.

Pemerintah berkewajiban melakukan campur tangan dalam kondisi investasi yang menurun. Dengan adanya campur tangan dari pemerintah, maka

---

<sup>4</sup> <http://www.sindheraan.co.id/berita/0401/07/oni01.html>

investasi akan naik, dan daya beli masyarakat akan meningkat, maka pengusaha akan menaikkan produksinya, sehingga memerlukan tambahan tenaga kerja. Dengan demikian, maka pengangguran akan berkurang.<sup>5</sup>

Politik luar negeri suatu negara sesungguhnya merupakan hasil perpaduan dan refleksi dari politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional maupun Internasional. Demikian pula halnya dengan politik luar negeri Indonesia yang tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor, antara lain posisi geografis yang strategis, yaitu posisi silang antara dua benua dan dua samudra potensi sumber daya alam dan manusia berikut susunan demografi dan sistem sosial-politik yang sangat mempengaruhi sikap, cara pandang serta cara kita memposisikan diri di forum internasional. Oleh karena itu, pelaksanaan politik luar negeri pun dengan sendirinya diarahkan pada prioritas pencapaian kepentingan Nasional dengan mengupayakan dan mengamankan serta meningkatkan kerja sama dan dukungan negara-negara sahabat serta badan-badan internasional bagi percepatan pemulihan perekonomian nasional dan sekaligus mengupayakan pulihnya kepercayaan internasional terhadap tekad dan kemampuan pemerintahan baru untuk mengatasi krisis multidimensional yang sedang Indonesia hadapi saat ini.

---

<sup>5</sup> ... .. (2000)

#### **D. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka Penulis mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut :

***“Peran Aktif Apa Yang Dilakukan Indonesia Untuk Mencapai Kepentingan Nasional Pada Forum Regional ASEAN Dalam Hubungan Kerjasama Bilateral Dengan ASEAN Plus One ( Cina)?”***

#### **E. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN**

Dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan teori-teori/konsep atau pendapat para ahli yang tentunya berkorelasi dengan obyek yang dikaji. Hal ini dilakukan untuk memberikan dasar pemikiran yang kuat dalam suatu penelitian hingga diakui kebenarannya dalam mendukung suatu hipotesis

Untuk dapat menganalisa suatu permasalahan dibutuhkan suatu alat bantu berupa teori-teori yang dapat kita gunakan. Suatu teori dibutuhkan sebagai pegangan pokok secara umum, terdiri dari sekumpulan data yang tersusun dalam suatu pemikiran, yang terdiri dari berbagai fakta yang membentuk dalil tertentu.

Teori berfungsi untuk memahami serta memberikan hipotesa secara sistematis, disamping menjelaskan maksud terhadap berbagai fenomena yang ada.

Tetapi menggunakan teori fenomena tersebut akan sulit dipahami di sisi lain

teori juga dapat berupa sebuah bentuk pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.<sup>6</sup>

Menurut Mochtar Mas'ood, teori merupakan penjelasan yang paling umum yang memberitahukan kepada kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu akan terjadi. Dengan demikian selain dipakai untuk eksplanasi, teori juga merupakan dasar dari sebuah prediksi dari pengertian ini, singkatnya teori dapat juga dikatakan sesuatu yang terjadi atau yang akan terjadi<sup>7</sup>.

Untuk dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan ***“Peran Aktif Apa Yang Dilakukan Indonesia Untuk Mencapai Kepentingan Nasional Pada Forum Regional ASEAN Dalam Hubungan Kerjasama Bilateral Dengan ASEAN Plus One (Cina)?”***, maka penulisan skripsi ini menggunakan konsep kepentingan nasional, teori pembuatan keputusan luar negeri Willian D. Caplin dan teori peranan. Dengan tujuan agar dapat menggambarkan secara teoritis penulisan ini. Tetapi sebelumnya akan dibahas mengenai pengertian kepentingan nasional secara umum dari berberapa perspektif.

### **1. Konsep Kepentingan Nasional**

Pembahasan mengenai politik luar negeri senantiasa dimulai dari kepentingan nasional negara yang melaksanakannya. Dengan demikian pemaparan tentang politik luar negeri juga harus didasarkan pada konsep kepentingan nasional.

---

<sup>6</sup> Jack C Plano, *The International Relation Dictionary*, Santa Barbara, California Press, 1992, hal 7

<sup>7</sup> Mochtar Mas'ood, *Teori Politik Internasional*, Jakarta, 1992, hal 217

Menurut Jack C Plano dan Roy Olton, Kepentingan Nasional adalah :

*“Politik Luar Negeri sebagai strategi atau bagian yang terencana dari tindakan yang dihasilkan oleh para pembuat keputusan suatu Negara lain atau unit politik Internasional bertujuan untuk mencapai kepentingan Nasional.”*

*(foreign policy as a strategy or planned course of action developed by the decision makers of state vis a vis other state or international antities aimed at achieving specific goals defined in terms of national interest).<sup>8</sup>*

Setiap negara yang berinteraksi dengan negara lain menggunakan politik luar negeri sebagai sarana interaksi dan komunikasi senantiasa berlandaskan pada kepentingan nasional masing-masing. Artinya, politik luar negeri merupakan politik untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki.<sup>9</sup>

Untuk mencapai tujuan nasional, perlu dipertimbangkan juga kekuatan nasional yang dimiliki. Menurut Morgenthau, kekuatan nasional meliputi: geografi, sumber daya alam, kemampuan industri, kesiagaan militer, penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi dan kualitas pemerintah.<sup>10</sup>

Adapun elemen-elemen dari kepentingan nasional, menurut Roy Olton dan Jack C. Plano, mencakup : pertahanan diri (*self preservation*), kemandirian

---

<sup>8</sup> Jack C. Plano and Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, Holt, Rineheart & Winston, USA, 1967, hal. 127

<sup>9</sup> Sufri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998, hal. 10

<sup>10</sup> Morgenthau, *Politics Among Nations*, New York: The Free Press, 1963, hal. 1

(*independence*), integritas teritorial (*territorial integrity*), keamanan militer (*militer security*), dan kemakmuran ekonomi (*economic wellbeing*).<sup>11</sup>

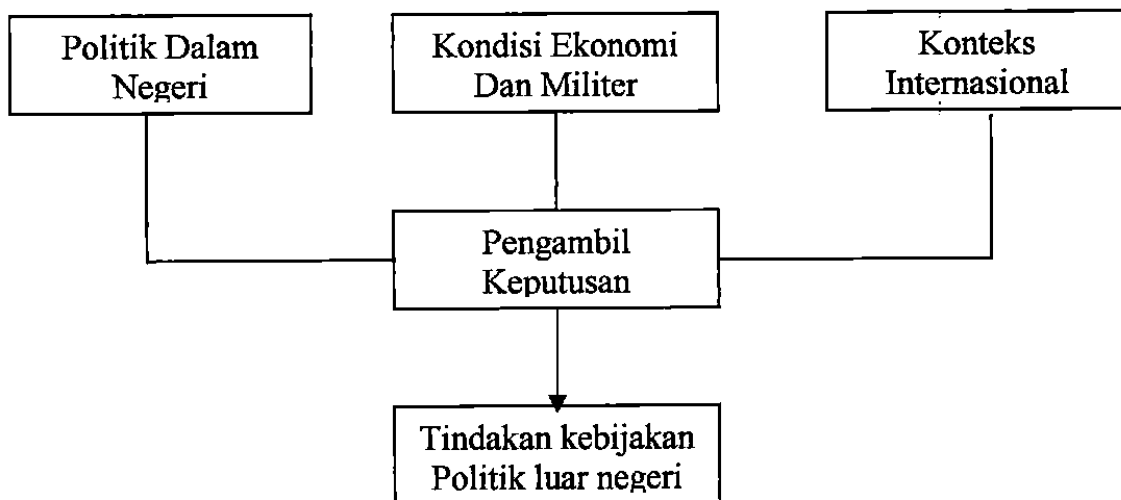
## **2. Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri William D.Caplin**

Dalam menganalisa masalah diatas, penulis juga akan menggunakan teori pembuatan/pengambilan keputusan luar negeri dari William D. Coplin serta sebagaimana tercantum dalam GBHN, kebijakan pemerintah Indonesia haruslah diabdikan untuk kepentingan Nasional. Oleh karena itu, untuk lebih memperjelas analisa, maka penulis menggunakan Konsep Pembuatan Keputusan Luar Negeri Menurut William D. Coplin :

*“Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu Negara maka kita harus mempertanyakan para pemimpin Negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa pemimpin Negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan (konsiderasi). Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri: pertama, kondisi politik dalam negeri termasuk budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Kedua, situasi ekonomi dan militer Negara tersebut termasuk faktor geografis yang selalu jadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan. Ketiga, konteks Internasional (situasi*

*Negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari Negara-Negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi).*<sup>12</sup>

Untuk lebih jelasnya ilustrasi bagan dibawah ini akan menjelaskan interaksi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan luar negeri.



Keterangan :

#### 1. Kondisi politik dalam negeri

Menurut Coplin kondisi politik dalam negeri suatu Negara merupakan salah satu variable penentu dalam pembuatan keputusan luar negeri Negara tersebut. Termasuk sistem politik yang diterapkan, perbedaan antara sistem politik autokratis dan sistem politik demokratis mempengaruhi penyusunan politik luar negeri. Selain itu stabilitas politik juga mempengaruhi dalam pembuatan politik luar negeri.

Keterkaitan antara kondisi politik dalam negeri juga bisa dibuat kerangka konseptual berfokus pada hubungan antara para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri (*policy influencers*).

Peran politik dalam negeri terhadap tindakan politik luar negeri juga bisa dianalisa melalui struktur sistem pengaruh kebijakan, serta peran sistem itu dalam perumusan politik luar negeri. Politik dalam negeri merupakan seperangkat determinan bagi pembuatan politik luar negeri. Dengan melihat atribut-atribut sistem politik luar negeri, seperti terbuka-tertutup atau stabil-tidak stabil bisa membentuk aspek-aspek politik luar negeri tertentu.

## 2. Kondisi Ekonomi dan Militer

Kondisi ekonomi dan militer memainkan peranan penting dalam proses penyusunan politik luar negeri, dengan memberikan dukungan dan tuntutan kepada para pengambil keputusan politik luar negeri. Komitmen suatu Negara harus diimbangi dengan kemampuan untuk menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk menopang politik luar negerinya.

Untuk mengamati peran kemampuan ekonomi terhadap politik luar negeri suatu negara yaitu dengan melihat kekuatan ekonomi Negara tersebut yang bisa diukur dengan kapasitas produksi barang dan jasa (GNP) dan tingkat kebergantungan pada perdagangan financial internasional. Sementara itu tingkat kemampuan militer dapat diukur melalui jumlah tentara, kualitas perlengkapan



Konteks Internasional yaitu posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem itu. Sifat sistem internasional dan hubungan antara negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem itu menentukan bagaimana negara akan berperilaku.

Konteks Internasional mengenai faktor-faktor geografis, ekonomi dan politis. Letak wilayah penting dalam menetapkan konteks Internasional suatu Negara dalam bidang yang berkaitan dengan logistik, militer. Pola perdagangan, pola aliansi dan sebagainya. Hubungan ekonomi juga merupakan bagian penting dalam Konteks Internasional, yaitu meliputi arus dagang dan jasa maupun arus modal yang telah membuat negara saling bergantung. Hubungan politik dalam Konteks Internasional sangat berperan dalam keputusan-keputusan politik luar negeri suatu Negara.

Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa kepentingan nasional bersumber dari seluruh nilai yang digeneralisasikan pada keseluruhan kondisi yang dihadapi oleh suatu negara terhadap negara lain. Kepentingan nasional juga merupakan faktor penting bagi setiap negara dalam melaksanakan politik luar negeri suatu negara, dimana ia tidak hanya menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan bagi pertimbangan strategi untuk menghadapi adanya ancaman tetapi juga akan menentukan pilihan skala prioritas politik luar negeri suatu negara.<sup>13</sup>

### 3. Teori Peranan (role theory)

Dalam menjelaskan perilaku politik luar negeri maka perilaku atau peranan aktor internasional harus dipahami dalam konteks sosial. Kita tidak akan menjelaskan fenomena politik kalau kita hanya melihat individu terlepas dari konteks sosialnya. Perilaku para pembuat keputusan politik luar negeri, misalnya, selalu dibatasi oleh lingkungannya. Salah satu kendala itu adalah peranan atau serangkaian peranan yang dipegangnya dalam proses politik. Peranan (role) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.<sup>14</sup> Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada suatu posisi. Setiap orang yang menduduki posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu. Teori Peranan seperti yang diungkapkan Stanley Hoffman menegaskan bahwa “*perilaku politik... adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik*”<sup>15</sup>. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik<sup>16</sup>. Menurut John Walke, Teori peran memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. pertama ia menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Maka kegiatan politik individu selalu ditentukan oleh konteks sosialnya. Teori Peranan memandang individu sebagai seseorang yang tergantung pada dan bereaksi terhadap perilaku orang lain. kedua teori peranan

---

<sup>14</sup> Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional: tingkat analisis dan teorisasi*. hal 44

<sup>15</sup> Stanley Hoffman, dikutip dalam Morgan, *loc. cit.*

mempunyai kemampuan mendeskripsikan institusi secara behaviorial<sup>17</sup>. Institusi politik adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peranan. Model teori peranan langsung menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai Institusi. Dan Peran-peran ini adalah komponen-komponen yang membentuk Institusi dengan kata lain, Institusi bisa didefinisikan sebagai serangkaian Peran yang saling berkaitan yang berfungsi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan<sup>18</sup>.

Hal pokok yang mendasari hubungan internasional adalah kepentingan nasional. Termasuk di dalamnya masalah pembangunan. Dan masalah pembangunan terkait dengan masalah investasi modal. Melihat hal ini kemudian posisi negara-negara berkembang memecahkan persoalan pembangunan dengan mencari investasi modal baik dari dalam maupun luar negeri yang selanjutnya hal inilah yang menyebabkan investasi asing masuk ke negara-negara berkembang. Terlebih saat ini interdependensi sangat tinggi, dan ekonomi memiliki peran yang sangat signifikan di dalamnya.

Pemahaman dalam permasalahan ekonomi politik dalam sistem hubungan internasional tidak akan dapat dicapai hanya dengan memperhatikan

---

<sup>17</sup> Harold dan Margaret Sprout, *Toward Politics of The Planet earthi* (New york : Van Nostrand, 1971) dan Dennis Pirage, *Global Ecopolitics*, ( Duxbury 1978).

aspek-aspek tersebut secara terpisah. Menurut Joan Spero, Kebijakan Perdagangan Luar Negeri seringkali didasarkan pada tujuan-tujuan politik<sup>19</sup>.

Berdasarkan beberapa kerangka pemikiran di atas penulis mencoba menyusun hipotesa sebagai suatu jawaban sementara tentang *“Peran Aktif apa yang dilakukan Indonesia untuk mencapai kepentingan Nasional pada Forum Regional ASEAN dalam Hubungan kerjasama bilateral dengan Cina yang tergabung dalam (ASEAN Plus One)?”*

## **F. HIPOTESA**

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran yang digunakan maka penulis mempunyai hipotesa sebagai berikut :

Dalam mewujudkan kepentingan nasional yang akan dicapai yaitu pemulihan perekonomian dan investasi asing terutama dari Cina, maka Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya menggunakan strategi diplomasi dan memainkan peran yang signifikan sebagai mediator terhadap konflik dikawasan demi terciptanya stabilitas keamanan regional. Untuk membantu upaya pemulihan ekonomi dan pemulihan citra Indonesia, diplomasi diarahkan dapat menterjemahkan kedekatan politik dalam hubungan bilateral menjadi interaksi-interaksi produktif di bidang perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi negara.

## **G. JANGKAUAN PENELITIAN**

Sebagai usaha menghindari diri dari penulisan ilmiah yang *split* (terlampau luas dan tidak terarah) sehingga akan mengaburkan isi dan topik pembahasan, maka diperlukan pembatasan. Upaya pembatasan masalah ini dimaksudkan agar disamping penulis dapat tetap terfokus, juga membantu mempermudah dalam pengumpulan dan penelitian data.

Kesengajaan membatasi pola hubungan kedua negara dengan memilih stressing pada tahun 1999 sampai 2005, karena pada rentan waktu tersebut mudah diidentifikasi terjadinya sejumlah peristiwa perubahan internal kedua negara secara signifikan yang menandai adanya peningkatan hubungan kerjasama Indonesia-Cina. dengan maksud supaya pokok bahasan lebih ramping dan lebih fokus dalam pengolahan data, sehingga tercapai tujuan penulis.

## **H. METODE PENELITIAN**

Selama penelitian, pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode yang bersifat literasi atau metode penelitian yang didasarkan riset kepustakaan (*library research*). mempelajari berbagai macam literatur buku, makalah, koran yang berkaitan dengan penelitian, dan selain itu

... .. mengambil data-data dari media internet sebagai sumber pendukung

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini akan memuat tentang uraian pembahasan, Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Pokok permasalahan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan dan Kerangka Dasar Penulisan.

### **BAB II : ASEAN REGIONAL FORUM (ARF) DAN ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) MENUJU ASEAN PLUS ONE (CINA)**

Dalam Bab ini akan menjelaskan dan menggambarkan proses terbentuknya ASEAN Regional Forum, ASEAN Free Trade Area dan ASEAN plus one (Cina), hubungan kerjasama kemitraan yang terjalin didalamnya baik level regional dan bilateral kawasan kedua Negara.

### **BAB III : POLITIK LUAR NEGERI R.L. TERHADAP HUBUNGAN KERJASAMA REGIONAL ASEAN PLUS ONE (CINA).**

Pembahasan dalam Bab ini meliputi, kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi hubungan kerjasama antara Indonesia-Cina, langkah

**BAB IV : PELAKSANAAN PERAN STRATEGI POLITIK LUAR NEGERI R.I. DALAM PENCAPAIN KEPENTINGAN NASIONAL MELALUI KERJASAMA BILATERAL FORUM ASEAN PLUS ONE(CINA)**

Dalam Bab ini akan dibahas peran strategi kebijakan politik luar negeri R.I. dalam mencapai kepentingan nasional melalui hubungan kerjasama dengan Cina diberbagai bidang pembangunan ekonomi baik sektor perdagangan dan investasi.

**BAB V : BAB INI BERISI KESIMPULAN DARI SEMUA HASIL PENELITIAN PENULIS DAN BERISI SARAN-SARAN UNTUK BERTAKRIFAN DIKEMUNDIAN HADI**